

DAFTAR PUSTAKA

- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, E. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam mewujudkan Good Governancedi Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 2–4.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137>
- Nukdin, N. I., Wawo, A. B., & Aswati, W. O. (2025). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(02), 240–242.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33772/jakuho.v10i02.295>
- pemerintah pusat. (2014). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerpres. In *Republik Indonesia*. LN.2014/NO.400, LL SETKAB : 29 HLM.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2019).
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 Tahun 2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan (2016).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (2024).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2014).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pub. L. 60 (2008).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>

Rahmawati, E. D. (2026). Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Desa Kaligoro Mojokerto. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 6(1), 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jisp.v6i1.455>

Siahaan, R. U., & Fachruzzaman. (2025). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Kajian Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Peraturan Perundangan, Dan Efektivitas Pengendalian Intern. *JURNAL AKUNIDA*, 11(1), 53–56.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) (2021).

Stefan, P. N., Tinangon, J., & Afandi, D. (2023). Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai

Timur. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 106–113.

<https://doi.org/10.58784/rapi.67>

Widianto, A. R. Z., & Karina, A. (2021). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2–4.

Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya*, 13(4), 549.

